

IUU FISHING KAPAL VIETNAM DI PERAIRAN NATUNA

7

Rizki Roza

Abstrak

Kapal Satgas 115 Indonesia kembali menangkap kapal ikan asing berbendera Vietnam di perairan Natuna pada bulan Februari 2019. Upaya penangkapan tersebut menghadapi gangguan dari kapal Pemerintah Vietnam, mengesankan ada upaya sengaja melindungi kapal yang melakukan pencurian ikan di perairan Indonesia. Ini merupakan perkembangan baru yang harus direspons oleh Pemerintah Indonesia. Dengan pertumbuhan pesat sektor perikanan Vietnam dan kebutuhan Vietnam untuk dinyatakan mematuhi ketentuan Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing (IUU Fishing) oleh Uni Eropa, sulit dipahami jika tindakan Vietnam tersebut dilakukan dengan sengaja untuk melindungi kegiatan ilegal. Indonesia harus mengelola persoalan ini dengan hati-hati, menjaga keseimbangan antara bertindak tegas menjaga kedaulatan dengan menjaga hubungan bilateral yang baik, termasuk potensi kerja sama bidang perikanan. DPR RI perlu mendorong pemerintah untuk mengkaji dengan cermat langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk meredam berbagai potensi sengketa kelautan dan perikanan antara kedua negara. Tulisan ini akan mengkaji latar belakang tindakan pemerintah Vietnam dan bagaimana Indonesia harus meresponsnya.

Pendahuluan

Kapal patroli TNI Angkatan Laut, KRI Bung Tomo-357, pada 24 Februari 2019 kembali menangkap empat kapal ikan asing (KIA) berbendera Vietnam di perairan Natuna. Kapal-kapal tersebut diduga melakukan penangkapan ikan secara ilegal di landas kontinen Laut Natuna, Indonesia. Patroli dan penangkapan kapal-kapal ikan asing ini sudah menjadi kegiatan rutin dan merupakan wujud komitmen Indonesia untuk menjaga kedaulatannya. Namun

terdapat kondisi yang berbeda dalam upaya penangkapan keempat kapal tersebut. Kapal Vietnam Fisheries Resources Surveillance (VFRS) Kem Ngu 2142124 dan 214263 melakukan manuver yang berusaha menghalangi penangkapan dan dapat membahayakan awak KRI TOM-357.

Kehadiran kapal Pemerintah Vietnam merupakan perkembangan baru dan menjadi tantangan bagi Indonesia dalam menjaga kedaulatan dan memberantas *Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing (IUU Fishing)*



khususnya di Perairan Natuna. Mengapa Pemerintah Vietnam mengambil langkah ini? Apakah tindakan ini dapat dilihat sebagai bentuk pengawalan yang dengan sengaja melindungi kegiatan *IUU Fishing*? Bagaimana Indonesia harus merespons perkembangan ini? Tuliskan singkat ini akan mencoba menjawab pertanyaan tersebut dengan terlebih dahulu berusaha memahami latar belakang tindakan Pemerintah Vietnam tersebut.

Arti Penting Sektor Perikanan bagi Vietnam

Vietnam merupakan salah satu pemain penting dalam pasar perdagangan produk kelautan dunia dan menyimpan cadangan sumber daya perikanan yang cukup besar. Sektor perikanan, baik perikanan tangkap maupun budi daya, telah berkontribusi terhadap menurunnya tingkat kemiskinan dan meningkatnya penyerapan lapangan kerja di Vietnam. Produk hasil laut Vietnam dipasarkan ke berbagai negara, terutama AS, Jepang, China, Republik Korea, Kanada, Jerman, Inggris, dan Belanda.

Vietnam terus berupaya meningkatkan tangkapan ikan, baik di laut lepas maupun di daerah perairan dekat pantai. Pada akhir 2016 saja, tercatat Vietnam memiliki armada kapal ikan yang cukup banyak, yaitu 110,000 kapal. *Master plan* sektor perikanan Vietnam dengan Visi hingga 2030, menargetkan pembangunan enam pusat perikanan skala besar yang masing-masing terhubung dengan daerah penangkapan ikan utama. Investasi pengembangan infrastruktur dan kapal ikan menjadi salah satu upaya Vietnam untuk membangun sektor perikananannya.

Perairan sepanjang garis pantai Vietnam yang mencapai 3.260 km merupakan bagian penting produksi perikanan di mana terdapat zona budi daya perikanan yang mengalami perkembangan pesat dan menjadi kontributor besar bagi pertumbuhan ekonomi nasional Vietnam. Meskipun sempat mengalami persoalan pada tahun 2011, yaitu wabah penyakit yang menyebabkan produksi budi daya perikanan Vietnam merosot, tahun-tahun berikutnya produksi perikanan Vietnam kembali bangkit dan terus meningkat. Pada 2016, total produksi perikanan diperkirakan mencapai 6,7 juta ton, meningkat 2,5% dibanding tahun sebelumnya. Nilai ekspor perikanan diperkirakan mencapai 7 miliar dolar AS, 6,5% lebih tinggi dari tahun sebelumnya. Produk utama Vietnam antara lain udang, ikan tra, dan ikan tuna yang mencakup 70% produksi. Periode 2017 ekspor perikanan Vietnam sudah lebih dari dua kali lipat Indonesia, mencapai US\$8.3 miliar, sementara Indonesia hanya sebesar US\$4 miliar. Ekspor udang Vietnam bahkan lebih jauh mengungguli Indonesia, yaitu mencapai US\$3.8 miliar, sementara Indonesia hanya US\$1.8 miliar (kontan.co.id, 4 Januari 2019).

Ekspor ikan patin Vietnam menghasilkan nilai perdagangan yang mengesankan sejak 2018 dan menunjukkan peran pentingnya di banyak pasar besar. Namun, untuk mengejar target nilai ekspor 2019 sebesar US\$10 miliar, Truong Dinh Hoe, Sekretaris Jenderal Vasep (Asosiasi Pengolahan dan Ekspor Perikanan Vietnam) menyatakan bahwa cabang perikanan harus menyusun strategi pengembangan budi daya dan meningkatkan teknologi pengolahan. Pernyataan ini

juga mencerminkan bahwa Vietnam tidak menggantungkan diri pada sektor perikanan tangkap.

Vietnam juga sedang membenahi tata kelola perikanannya menuju perikanan yang berkelanjutan sebagaimana yang harus dilakukan banyak negara dalam beberapa tahun terakhir. Negara yang lamban beradaptasi akan menghadapi konsekuensinya, sebagai contoh Vietnam sendiri. Industri perikanan Vietnam mengalami banyak hambatan dan kesukaran pada 2017 karena mendapat peringatan 'kartu kuning' dari Uni Eropa karena dianggap belum menaati ketentuan-ketentuan *IUU Fishing* dari Uni Eropa. Akibatnya produk perikanan Vietnam sulit untuk masuk pasar Eropa.

Pada tahun 2018, nilai ekspor perikanan Vietnam diperkirakan mencapai US\$9 miliar. Untuk menjaga pertumbuhan tersebut, Menteri Pertanian dan Pengembangan Pedesaan Vietnam Nguyen Xuan Cuong menyatakan bahwa sektor perikanan harus berupaya gigih untuk mengatasi kartu kuning Uni Eropa. Implementasi UU Perikanan 2017 tampaknya menjadi instrumen penting bagi Vietnam untuk mengatasi kartu kuning Uni Eropa, sehingga pemerintahnya pun melakukan sosialisasi untuk meningkatkan pemahaman komunitas badan usaha, kaum nelayan, dan daerah-daerah dalam menerapkannya.

Berdasarkan uraian di atas, setidaknya dapat dipahami beberapa hal, yaitu **pertama**, sektor perikanan memiliki peran penting bagi perekonomian Vietnam; **kedua**, Vietnam terus berusaha memperbesar nilai ekspor produk perikanannya, baik tangkap maupun budi daya; dan **ketiga**, Vietnam sedang berusaha membenahi tata

kelola perikanannya agar dapat terlepas dari 'kartu kuning' Uni Eropa. Dengan demikian, menjadi kontraproduktif jika Pemerintah Vietnam melakukan pengawasan mendukung nelayannya melakukan pencurian ikan. Kehadiran kapal-kapal VFRS dapat juga dipahami sebagai bentuk upaya Pemerintah Vietnam mencegah kapal-kapal ikannya melakukan kegiatan *IUU Fishing*, bukan dukungan pengawasan untuk melakukan *IUU Fishing*.

Menjaga Kedaulatan dan Hubungan Bilateral

Pemerintah Indonesia, khususnya dengan membentuk Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Ilegal (Satgas 115) yang terdiri dari Bakamla, Polisi Air, PSDKP dan TNI AL, terus berupaya memberantas pelaku *illegal fishing* di perairan Indonesia. Tindakan penenggelaman, termasuk dengan pembakaran kapal pelaku *illegal fishing* yang telah diputus oleh Pengadilan karena terbukti mencuri ikan di wilayah laut Indonesia, menjadi salah satu langkah yang diharapkan akan memberikan efek jera. Tidak hanya secara unilateral, Indonesia juga mendorong komitmen negara-negara anggota ASEAN untuk bersama-sama memerangi *IUU Fishing*. Melalui kerangka *South East Asia Fisheries Development Centre* (SEAFDEC) yang terdiri dari negara anggota ASEAN dan Jepang, telah dihasilkan *Joint ASEAN-SEAFDEC Declaration on Combating IUU Fishing and Enhancing Fish and Fisheries Product Competitiveness in Southeast Asia*. Deklarasi ini diharapkan menjadi komitmen dasar setiap negara ASEAN dalam meningkatkan

kerja sama untuk mencegah dan memberantas *IUU Fishing*.

Pemerintah Indonesia bertindak tegas dan menyatakan tidak ada kompromi dalam memerangi *IUU Fishing*. Indonesia telah menenggelamkan 488 kapal pelaku *IUU Fishing* antara Oktober 2014 hingga Agustus 2018, (kkp.go.id, 21 Agustus 2018). Sebagian besar dari kapal itu (276 buah) merupakan kapal berbendera Vietnam, terbanyak dibanding kapal asal Filipina, Thailand, Malaysia, Papua Nugini, dan China. Tidak hanya menenggelamkan KIA, 26 kapal berbendera Indonesia yang melakukan *IUU Fishing* juga telah ditenggelamkan. Tindakan ini juga dianggap sebagai salah satu faktor yang mendorong peningkatan stok ikan nasional. Pada 2017 tercatat stok ikan nasional mengalami peningkatan hingga mencapai 12,5 juta ton yang sebelumnya pada 2015 sebesar 7,3 juta ton (kkp.go.id, 20 Juni 2017).

Sejak penerapan penenggelaman kapal pencuri ikan, yaitu akhir tahun 2014, sejumlah negara menyampaikan protes terhadap kebijakan Indonesia tersebut, termasuk Vietnam. Pada Desember 2014, Pemerintah Vietnam melayangkan protes karena beberapa kapal ikan asal negaranya diledakkan oleh TNI AL. Namun pemerintah Indonesia tetap melanjutkan langkah tersebut karena dianggap sudah sesuai dengan ketentuan internasional. Protes terhadap tindakan Pemerintah Indonesia tidak hanya datang dari Pemerintah Vietnam. Pada Januari 2018, Ha Hai dari Asosiasi Advokat Ho Chi Minh City yang mewakili sejumlah kapten kapal Vietnam yang ditahan di Indonesia mengatakan bahwa sebagian kapal yang ditangkap Indonesia sebenarnya masih berada di perairan negara

mereka. Mereka juga mengklaim memiliki cukup bukti bahwa Indonesia berulang kali menahan kapal ikan Vietnam di perairan Vietnam dan bukan di perairan yang dipersengketakan. Klaim semacam ini dapat juga dipahami sebagai salah satu faktor pendorong kehadiran kapal-kapal VFRS di sekitar perairan Natuna, sebagai bentuk perlindungan terhadap warga negaranya dari kemungkinan tindakan-tindakan yang tidak sesuai ketentuan hukum internasional.

Insiden yang terjadi di perairan Natuna antara kapal patroli Indonesia dengan kapal Pemerintah Vietnam jika terjadi berulang dan tidak dikelola dengan baik, akan merusak hubungan bilateral kedua negara yang selama ini sudah terjalin dengan baik. Indonesia merupakan mitra penting bagi Vietnam, dan sebaliknya Indonesia juga menganggap Vietnam sebagai salah satu negara yang berpengaruh di ASEAN. Vietnam merupakan satu-satunya negara ASEAN yang membangun kemitraan strategis dengan Indonesia. Kemitraan Strategis Indonesia-Vietnam dibentuk sejak 2013, dan telah dilanjutkan dengan penyusunan *Strategic Partnership Action Plan*. Kedua negara juga sepakat mengenai pentingnya kerja sama di bidang kelautan dan perikanan guna memberantas *IUU Fishing* dan mendorong pengelolaan perikanan yang berkelanjutan. Pada April 2018, Menteri Luar Negeri kedua negara telah bersepakat untuk memperkuat kemitraan strategis.

Di sela pertemuan tahunan IMF-WB di Nusa Dua, Bali, pada Oktober 2018, Menteri Kelautan dan Perikanan RI Susi Pudjiastuti melakukan pertemuan bilateral dengan Menteri Pertanian Vietnam,

Hoang Van Thang untuk membahas penguatan kolaborasi industri pengolahan perikanan. Bagi Susi, kerja sama tersebut merupakan bentuk apresiasi Indonesia atas menurunnya pelanggaran penangkapan ikan secara ilegal oleh kapal berbendera Vietnam. Dalam kesempatan itu, Hoang menyampaikan bahwa pemerintahnya juga telah memperketat pengawasan terhadap kapal-kapal yang melanggar hukum dan memberi sanksi tegas terhadap pelaku.

Indonesia selayaknya lebih cermat dalam mengelola persoalan kegiatan penangkap ikan secara ilegal oleh KIA asal Vietnam di perairan Indonesia. Bertindak tegas untuk menjaga kedaulatan penting untuk dilakukan, tetapi di sisi lain ada pula hubungan diplomatik yang baik yang perlu dijaga. Berbagai jalur diplomatik yang sudah terbangun antara kedua negara harus dimanfaatkan secara optimal untuk menyelesaikan persoalan ini. Penguatan kerja sama bilateral diharapkan dapat menekan potensi konflik antara kedua negara akibat sengketa di sektor kelautan, termasuk melalui upaya menyelesaikan tumpang tindih delimitasi landas kontinen yang masih tersisa.

Penutup

Insiden antara kapal patroli Indonesia dengan kapal Pemerintah Vietnam merupakan kejadian yang tidak semestinya terjadi di antara kedua negara yang memiliki hubungan baik, terlebih kedua negara, bersama-sama negara anggota ASEAN lainnya, sudah berkomitmen untuk bekerja sama memerangi *IUU Fishing*. Sudah selayaknya Indonesia melayangkan protes kepada Pemerintah Vietnam

dan meminta penjelasan. Penelusuran terhadap kebijakan dan kondisi sektor perikanan Vietnam sebagaimana uraian di atas, setidaknya kehadiran kapal VFRS, juga dapat dipahami sebagai upaya meminimalisasi pelanggaran wilayah oleh kapal-kapal nelayannya dan sebagai bentuk perlindungan terhadap warga negaranya. Melakukan pengawalan dengan sengaja terhadap kapal nelayan untuk melakukan pencurian ikan di wilayah negara lain akan kontraproduktif dengan upaya Vietnam membebaskan diri dari 'kartu kuning' Uni Eropa.

Indonesia hanya perlu memastikan bahwa Uni Eropa mengetahui 'tindakan pengawalan pencurian' tersebut jika memang terbukti dilakukan untuk tujuan itu. DPR RI, melalui fungsi pengawasannya, perlu mengingatkan pemerintah untuk berhati-hati mengelola persoalan ini. DPR RI perlu mendesak pemerintah untuk memahami lebih jauh latar belakang tindakan Pemerintah Vietnam, agar upaya Indonesia menjaga kedaulatan dapat dilakukan dengan ketegasan namun tanpa merugikan hubungan kerja sama bilateral yang telah berkembang saling menguntungkan. Penguatan kerja sama, termasuk di bidang perikanan juga perlu didorong untuk menekan potensi sengketa, terlebih karena sektor perikanan Vietnam memang sudah cukup maju.

Referensi

"Cabang Perikanan Vietnam menuju ke target mencapai nilai ekspor sebesar 10 miliar USD", <http://vovworld.vn/id-ID/berita/cabang-perikanan-vietnam-menusju-ke-target-mencapai-nilai-ekspor-sebesar-10-miliar-usd-710777.vov> diakses 4 Maret 2019.

“Ekspor perikanan Indonesia kalah dari Vietnam”, <https://industri.kontan.co.id/news/ekspor-perikanan-indonesia-kalah-dari-vietnam> diakses 4 Maret 2019.

“Fisheries – important economic sector of Vietnam”, <https://english.vietnamnet.vn/fms/business/191835/fisheries---important-economic-sector-of-vietnam.html> diakses 4 Maret 2019.

“Hari Kemerdekaan, Pemerintah Tenggelamkan 125 Kapal Pelaku Illegal Fishing”, <https://kkp.go.id/artikel/5714-hari-kemerdekaan-pemerintah-tenggelamkan-125-kapal-pelaku-illegal-fishing> diakses 4 Maret 2019.

“Menteri Susi Minta Pemerintah Vietnam Minta Maaf”, <https://regional.kompas.com/read/2019/02/25/19451801/menteri->

[susi-minta-pemerintah-vietnam-minta-maaf](https://regional.kompas.com/read/2019/02/25/18464561/setelah-manuver-panjang-tni-al-tangkap-4-kapal-ikan-berbendera-vietnam-di) diakses 4 Maret 2019.

“Setelah Manuver Panjang, TNI AL Tangkap 4 Kapal Ikan Berbendera Vietnam di Natuna”, <https://regional.kompas.com/read/2019/02/25/18464561/setelah-manuver-panjang-tni-al-tangkap-4-kapal-ikan-berbendera-vietnam-di> diakses 4 Maret 2019.

“Vietnam sedang berupaya keras agar Uni Eropa membatalkan kartu kuning terhadap produk perikanan”, <http://vovworld.vn/id-ID/berita/vietnam-sedang-berupaya-keras-agar-uni-eropa-membatalkan-kartu-kuning-terhadap-produk-perikanan-686038.vov> diakses 4 Maret 2019.



Rizki Roza
rizki.roza@dpr.go.id

Rizki Roza, S.IP., M.Si., menyelesaikan pendidikan S1 Hubungan Internasional Universitas Muhammadiyah Yogyakarta pada tahun 2003 dan pendidikan S2 Hubungan Internasional Universitas Indonesia pada tahun 2007. Saat ini menjabat sebagai Peneliti Muda bidang Hubungan Internasional pada Pusat Penelitian-Badan Keahlian DPR RI. Beberapa karya tulis ilmiah yang telah dipublikasikan melalui jurnal dan buku antara lain: “Confidence Building Measures dan Program nuklir Iran” (2010); “Konflik Laut China Selatan dan implikasinya terhadap modernisasi militer” (2013); dan “Kerjasama internasional dan Peran industri sipil dalam industri pertahanan” (2013).

Info Singkat

© 2009, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI
<http://puslit.dpr.go.id>
ISSN 2088-2351

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi tulisan ini tanpa izin penerbit.